

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Paradigma Hukum	21
1. Deskripsi Paradigma Hukum.....	21
2. Evolusi Paradigma Hukum.....	22
3. Implikasi Paradigma Hukum dalam Kebijakan Publik.....	23
B. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.....	28
1. Konsep Desentralisasi	28
2. Sistem Hubungan Pusat dan Daerah	32
3. Aspek Kelembagaan	34
4. Pemerintah Daerah.....	37
C. Teori Kebijakan	41
1. Konsep Kebijakan Publik	42
2. Model dan pendekatan Kebijakan Publik	46
3. Formulasi Kebijakan Publik	51

4.	Implementasi Kebijakan Publik.....	55
D.	Konsep Desa dan Struktur Kenegaraan	59
1.	Historis Konstitusional.....	59
2.	Tipologi, Otonomi dan Kewenangan Desa	62
3.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	67
4.	Badan Permusyawaratan Desa	70
5.	Desa dan Dana Desa.....	72
E.	Kaidah Otonomi Pra dan Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014	75
1.	Konsep Otonomi Desa Sebelum Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	76
2.	Konsep Otonomi Desa Setelah Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	79
3.	Aspek Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis Keberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014	84
F.	Teori Sumber Daya Manusia	88
G.	Teori Kinerja.....	95
H.	Teori Kesejahteraan	99
I.	Penelitian Terdahulu	104
BAB III METODE PENELITIAN		122
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	122
B.	Locus Penelitian.....	124
1.	Lokasi Penelitian Desa Maron	125
2.	Lokasi Penelitian Desa Minggirsari	125
3.	Lokasi Penelitian Desa Modangan	127
4.	Lokasi Penelitian Desa Kemloko.....	128
C.	Sumber Data.....	129
1.	Sumber Data Primer	130
2.	Sumber Data Sekunder.....	132
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	132
1.	Observasi.....	133
2.	Wawancara Mendalam (<i>Deep Interview</i>)	133

3.	Dokumentasi.....	134
E.	Pengecekan Keabsahan Data	134
1.	<i>Prolonged Engagement</i>	135
2.	Ketekunan Pengamatan (<i>Persistent Observation</i>).....	135
3.	<i>Ttriangulation</i>	136
F.	Teknik Analisis Data.....	137
1.	Langkah Pengumpulan Data	138
2.	Kondensasi Data	138
3.	Menyajikan Data.....	138
4.	Penarikan Kesimpulan.....	139
BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KINERJA APARATUR DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014.....		
		141
A.	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014.....	141
1.	Partisipasi Masyarakat Desa Maron Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	145
2.	Partisipasi Masyarakat Desa Minggirsari Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	146
3.	Partisipasi Masyarakat Desa Modangan Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	147
4.	Partisipasi Masyarakat Desa Kemloko Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	148
B.	Kinerja Aparatur Desa Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	150
1.	Kinerja Aparatur Desa Maron Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	153
2.	Kinerja Aparatur Desa Minggirsari Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	154
3.	Kinerja Aparatur Desa Modangan Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	156

4.	Kinerja Aparatur Desa Kemloko Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	157
C.	Responsivitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014.....	158
1.	Responsivitas Pemerintah Desa Maron Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	162
2.	Responsivitas Pemerintah Desa Minggirsari Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	164
3.	Responsivitas Pemerintah Desa Modangan Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014.....	165
4.	Responsivitas Pemerintah Desa Kemloko Dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014.....	166
	BAB V PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PARTISIPASI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BLITAR	168
A.	Prinsip Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa	168
1.	Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Maron	172
2.	Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Minggirsari	173
3.	Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Modangan	174
4.	Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemloko	175
B.	Prinsip Transaparsi Dalam Pengelolaan Dana Desa	176
1.	Transaparsi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Maron.....	180
2.	Transaparsi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Minggirsari.....	181
3.	Transaparsi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Modangan.....	182
4.	Transaparsi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemloko	183
C.	Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa	184
1.	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Maron.....	188
2.	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Minggirsari.....	189
3.	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Modangan.....	190
4.	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kemloko	191

BAB VI IMPLEMENTASI UU DESA MENDORONG PEMERINTAH DESA	
LEBIH RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN PRIORITAS UNTUK	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT193	
A.	Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .193
1.	Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maron..... 197
2.	Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Minggirsari..... 197
3.	Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Modangan..... 200
4.	Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kemloko 201
B.	Tantangan dalam Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat202
1.	Tantangan dalam Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maron 205
2.	Tantangan dalam Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Minggirsari 206
3.	Tantangan dalam Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Modangan 207
4.	Tantangan dalam Implementasi UU Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kemloko 208
C.	Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi UU Desa209
1.	Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Maron Melalui Implementasi UU Desa..... 212
2.	Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Minggirsari Melalui Implementasi UU Desa..... 214
3.	Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Modangan Melalui Implementasi UU Desa..... 215

4. Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemloko Melalui Implementasi UU Desa.....	216
BAB VII PENUTUP	218
A. Kesimpulan	218
B. Saran	219
DAFTAR PUSTAKA	221
LAMPIRAN.....	231
BIODATA PENULIS	254